

PUSTAKA ACUAN

A. BUKU

- Hetty Hassanah. *Aspek Hukum Perdata Di Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta. 2016.
- H.M. Arba. *Hukum agraria Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
- Ida Nurlinda. *Monograf Hukum Agraria: Membangun Pluralisme Hukum dalam kerangka Unifikasi Hukum Agraria*. LoGoz Publishing Bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum Lingkungan dan Penataan Ruang Fakultas Hukum Unpad. Bandung. 2014.
- Kemas Ali Hanifah. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*. Rajawali Pers. Depok. 2018.
- Nia Kurniati. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*. Refika Aditama. Bandung. 2016.
- Nurnaningsih Armani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Grafindo Persada. Jakarta. 2012.
- Sahnan. *Hukum Agraria Indonesia*. Setara Press. Malang. 2016.
- Siti Zumrokhatus dan Darda Syahrizal. *Undang-Undang Agraria & Aplikasinya*. Dunia Cerdas. Jakarta. 2014.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2010.
- Suriansyah Murhaini. *Hukum Pertanahan: Alih Fungsi Tanah dan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah*. Laksbang Justitia. Yogyakarta. 2021.
- Urip Santoso. *Hukum Agrari Kajian Komprehensif*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2015.
- Waskito dan Hadi Arnowo. *Pertanahan Agraria dan Tata Ruang*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2017.
- Yusriadi. *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2010.

B. JURNAL

- Aldi Subhan Lubis. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak. *Doktrina: Journal of Law - Universitas Medan Area*. (2019). [Vol. 2 No. 1].
- Arba, Sahnun, dan Wiwiek Wahyuningsih. Pemberdayaan Hukum dan Kebijakan Pertanahan sebagai Upaya Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. *Jurnal Mimbar Hukum - Universitas Gadjah Mada*. (2010). [Vol. 22 No. 1].
- Dayat Limbong. Tanah Negara Tanah Terlantar Dan Penertibannya. *Jurnal Mercatoria - Universitas Pembangunan Masyarakat Indonesia*. (2017). [Vol. 10 No. 1].
- Fauzie Kamal Ismail. Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Melalui Program Reformasi Agraria. *Lex Jurnalica - Universitas Esa Unggul*. (2013). [Vol. 10 No. 2].
- Joko Satrianto Wibowo. Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Obyek Landreform Untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum - Universitas Singaperbangsa Karawang*. (2016). [Vol. 1 No. 2].
- Lianton Vicco Yuniur. Wewenang Pemerintah dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar. *Jurnal Jurist-Diction - Universitas Airlangga*. (2019). [Vol. 2 No. 6].
- Supriyanto. Kriteria Tanah Terlantar. *Jurnal Dinamika Hukum - Universitas Jenderal Soedirman*. (2010). [Vol. 10 No. 1].
- Triana Rejekiningsih. Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia). *Yustisia – Universitas Sebelas Maret*. (2016). [Vol. 5 No. 2].
- Tutiek Retnowati dan Widyawati Boediningsih. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atastanah Terlantar. *Jurnal Lex Journal Kajian Hukum & Keadilan - Universitas Dr. Soetomo*. (2022). [Vol. 5 No. 2].
- Ulfia Hasanah. Redistribusi Tanah Terlantar Di Propinsi Riau. *Jurnal Ilmu Hukum - Universitas Riau*. (2014-2015). [Vol. 4 No. 3].
- Umiyati. Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Yang Didasarkan Pada Alat Bukti Sertipikat Melalui Alternative Dispute Resolution. *Jurnal Spektrum Hukum*. (2019). [Vol. 16 No. 2].

Zaki Ulya. Espaktasi Pengelolaan Tanah Terlantar Oleh Baitul Mal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. (2016). [Vol. 46 No. 4].

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakan-selanjutnya

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

D. SITUS INTERNET

Asep Nursobah. Peran Yurisprudensi dalam Perkara Sengketa Hak Atas Tanah (Wigati Pujiningrum, S.H., M.H). 2020. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1690-peran-yurisprudensi-dalam-perkara-sengketa-hak-atas-tanah-wigati-pujiningrum-s-h-m-h>.

Muhdany Yusuf Laksono. Berapa Lama Tanah Bisa Disebut Obyek Tanah Terlantar?. 2021. <https://www.kompas.com/properti/read/2021/11/11/060000321/berapa-lama-tanah-bisa-disebut-obyek-tanah-telantar-?page=all>.